

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran strategis Kepala Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang dalam manajemen aset kelurahan

Kepala Kelurahan memegang peran sentral dalam pengelolaan aset kelurahan secara menyeluruh, dari perencanaan hingga pengawasan, yang krusial untuk kesejahteraan warga dan pembangunan. Pengelolaan ini mencakup serangkaian aktivitas detail seperti perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, hingga pelaporan. Dalam praktiknya, Kepala Kelurahan, seperti di Cipocok Jaya, menghadapi tantangan klaim aset yang diatasi melalui kerja sama inventarisasi data dengan BAPEDA Kota Serang, menunjukkan kesesuaian peran mereka dengan peraturan.

2. Perspektif Siyâsah Mâliyah Terhadap Manajemen Aset Kelurahan Cipocok Jaya

Pengaturan dalam Siyâsah Mâliyah berpusat pada kemaslahatan rakyat, melibatkan interaksi antara rakyat, harta, dan pemerintah. Dalam pengelolaan aset kelurahan seperti di Cipocok Jaya, pemerintah bertanggung jawab atas pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat, mengutamakan nilai-nilai Siyâsah Mâliyah. Prinsip-prinsip yang diterapkan meliputi Transparansi dan Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektivitas, Keadilan dan Pemerataan, serta Keberlanjutan (Istidama). Ini memastikan pembagian uang negara sesuai keadilan, bukan keinginan penguasa, karena merupakan harta umat. Akuntabilitas dan transparansi sangat utama untuk menjaga keadilan, kejujuran, dan keseimbangan transaksi keuangan, serta melibatkan tanggung jawab moral dan etika. Siyâsah Mâliyah juga menekankan prinsip pengelolaan yang baik seperti Integritas, Akuntabilitas, dan Partisipasi Publik, dengan tujuan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan kemaslahatan umum, sejalan dengan praktik pada masa Khalifah Umar bin Khaththab.

B. Saran

1. Menginformasikan laporan aset kelurahan secara rutin dan mudah diakses oleh masyarakat, seperti melalui papan informasi di kelurahan, situs web kelurahan, atau media sosial, jika ada. Adakan pertemuan rutin antara pemerintah kelurahan, RT/RW, dan masyarakat untuk membahas pengelolaan aset, menerima kritik, dan menjawab pertanyaan tentang aset kelurahan. Saat ada pembangunan, masyarakat harus diberi tahu untuk berpartisipasi.

2. Untuk memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan syariat dan untuk kepentingan umum, ini dapat dilakukan melalui badan pengawas lokal atau majelis syura yang terdiri dari tokoh agama dan masyarakat. Dalam pengawasan yang ketat diperlukan untuk menghindari akumulasi kekayaan di tangan individu atau kelompok tertentu melalui proyek yang tidak transparan.